
MANFAAT KENAIKAN PAJAK CUKAI DAN HARGA TEMBAKAU SECARA TELAAH SISTEMATIS

Diyah Hesti K.^{1(*)}, Inta Hartaningtyas R.², Roosita Meilani D.³

^{1, 2, 3} Center of Human and Economic Development (CHED) - ITB Ahmad Dahlan

Abstract

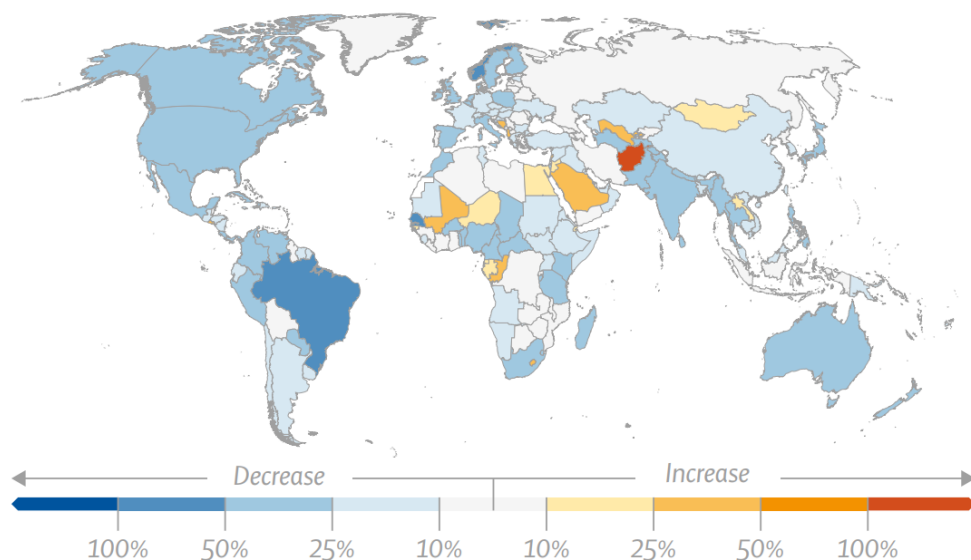
Globally, from 1990 to 2019, the prevalence of male smokers decreased by -27.5% to 32.7%, and the prevalence of female smokers was 6.62%. According to the GBD 2019 Tobacco Collaborators research, Indonesia is considered stagnant, with no decrease in smoking prevalence, as the prevalence of male smokers increased by +6.94% to 58.3%, and the prevalence of female smokers increased by 3.6%. Meanwhile, other countries have experienced a decrease in prevalence since the signing of the Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). The GATS research conducted by WHO in 2021 shows that the prevalence of male smokers in Indonesia is 65.5%. Nevertheless, Indonesia often raises tobacco taxes or Tobacco Excise to increase tobacco prices in an effort to reduce smoking prevalence. This study summarizes the benefits of higher tobacco taxes and prices using a systematic literature review based on PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analyses). Ninety articles in English on the benefits of tobacco taxes and prices were included in the analysis. The research results indicate that studies related to the benefits of tobacco taxes and prices focus on reducing the prevalence of adult and adolescent smokers, benefiting 20% of the low-income population, and generating significant socio-economic benefits. It was also found that countries implementing FCTC and increasing tobacco taxes experienced a significant decrease in smoking prevalence compared to Indonesia. Therefore, this research is expected to serve as a reference to optimize the benefits of tobacco tax increases by adopting tobacco control measures in countries successful in reducing smoking prevalence. This study focuses on the benefits of tobacco taxes after the implementation of the FCTC in 2003.

Keywords: tobacco tax, tobacco excise, benefits of tobacco tax, cigarette price increase

*Korespondensi : diyahhestik@gmail.com

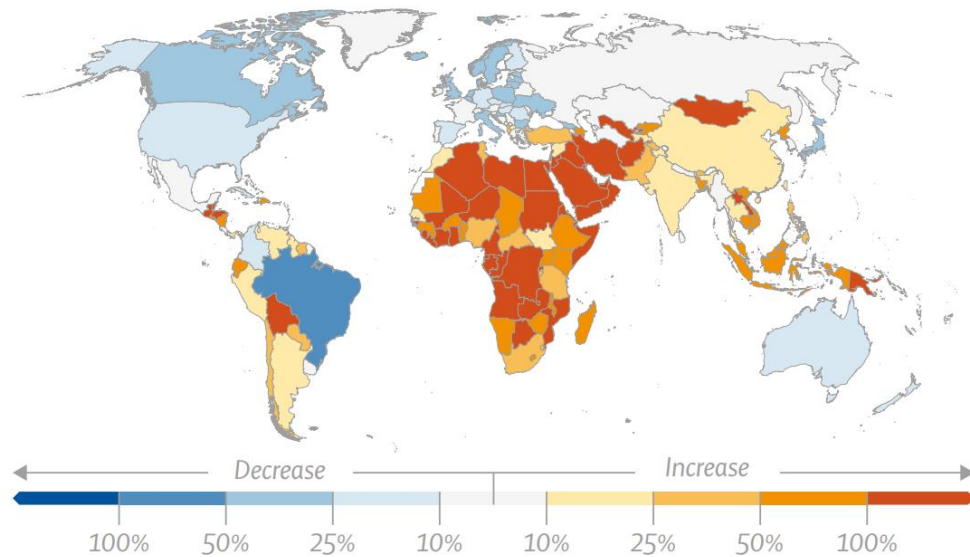
PENDAHULUAN

Semenjak ditetapkannya FCTC (kerangka kerja pengendalian tembakau), banyak negara yang mengalami penurunan prevalensi konsumsi tembakau [1]. Secara global dari tahun 1990, prevalensi perokok pria turun sebanyak - 27,5 % menjadi 32,7 % dan prevalensi perokok wanita 6,62%. Dalam riset GBD 2019 Tobacco Collaborators, Indonesia dianggap stagnan dan tidak mengalami penurunan prevalensi perokok karena perokok pria naik + 6,94% menjadi 58,3% dan prevalensi perokok wanita 3,6 %. Riset GATS yang dilakukan WHO tahun 2021 menunjukkan prevalensi perokok pria di Indonesia sebesar 65,5% (1). Jika dihitung dengan pertambahan jumlah penduduk maka jumlah perokok di Indonesia meningkat antara 25 - 50%. Data dari GBD berbeda sedikit dengan RISKEDAS dan SISKERNAS di mana prevalensi perokok pria tahun 2007 adalah 65,6% turun menjadi 62,9 % tahun 2018, sedangkan prevalensi perokok wanita tahun 2007 adalah 5,2% menjadi 4,8 % tahun 2018 (2). Walaupun turun sekitar 3 %, Indonesia masih di atas rata-rata prevalensi perokok dunia bahkan termasuk jumlah perokok nomor 3 (61,5 juta perokok) terbanyak di dunia setelah China (341,2 juta perokok) dan India (130,9 juta perokok) [1].



Gambar 1 : Perubahan prevalensi berdasarkan negara 1990 - 2019

Sumber : GBD 2019 Tobacco Collaborators (2021)



Gambar 2 : Perubahan jumlah perokok berdasarkan negara, 1990-2019

Sumber : GBD 2019 Tobacco Collaborators (2021)

Pemerintah Indonesia dari tahun 2012 hingga 2024 menaikkan pajak cukai tembakau dan harga jual eceran (HJE) tembakau kecuali pada tahun pemilu yaitu tahun 2014 dan 2019 (3). Mayoritas rata-rata kenaikan pajak tembakau adalah diatas 10 % dimana jenis Sigaret Kretek Mesin biasanya memiliki kenaikan tertinggi. Penerimaan cukai dari tembakau terus meningkat dari waktu ke waktu sejak 2009 sebesar Rp 56,72 triliun hingga Rp 203,81 triliun pada tahun 2021 (4). Namun masih belum bisa menurunkan secara drastis prevalensi merokok di Indonesia. Bahkan prevalensi perokok anak naik dari 7,20 % tahun 2013 menjadi 10,70 % tahun 2019 (5).

Pengendalian konsumsi tembakau melalui peningkatan pajak cukai tembakau dan harga tembakau perlu dikaji ulang. Penelitian ini menggunakan studi literatur secara sistematis atau *systematic literature review* (SLR) dari berbagai negara untuk melihat manfaat apa saja yang diperoleh oleh negara yang menerapkan pajak cukai tembakau dan harga tembakau yang lebih tinggi. Negara yang menjadi rujukan artikel, sudah meratifikasi FCTC (*Framework Convention on Tobacco Control*) dari WHO. Negara tersebut antara lain : Arab Saudi, Brazil, China, India, Iran, Jepang, Korea Selatan, Meksiko, Peru, Polandia, Taiwan, Thailand, Ukraina, Vietnam. Negara yang tidak meratifikasi FCTC dalam artikel ini adalah Amerika Serikat namun dengan prevalensi perokok yang lebih rendah daripada Indonesia yaitu : prevalensi perokok pria 19,9 % dan prevalensi perokok wanita 15,3 %.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menentukan apa variabel yang menjadi pertimbangan dalam menilai manfaat kenaikan pajak dan harga tembakau ?

STUDI LITERATUR

Pajak Cukai Tembakau

Peningkatan pajak cukai tembakau akan menyebabkan harga yang lebih tinggi, keterjangkauan (*affordability*) yang lebih rendah, dan konsumsi yang berkurang [2]. Laporan dari WHO menyatakan bahwa konsumsi tembakau menimbulkan berbagai masalah kesehatan dan penyebab utama kematian yang bisa dicegah seperti penyakit pembuluh darah, kanker dan penyakit pernapasan kronis [3]. Meningkatkan pajak cukai tembakau merupakan salah satu cara yang paling efektif dan hemat biaya untuk mengurangi konsumsi tembakau yang merusak, sementara juga menghasilkan pendapatan yang substansial [3]. Menaikkan pajak cukai tembakau tidak membutuhkan biaya promosi malah menambah pendapatan negara. Dari berbagai jurnal yang dikaji, melaporkan adanya peningkatan pendapatan negara pada awal peningkatan pajak cukai tembakau [4][5].

Pajak cukai dan harga tembakau yang lebih tinggi memberikan manfaat kesehatan dan finansial, terutama untuk masyarakat miskin [6] [7]. Karena sejumlah besar perokok dari kalangan miskin akan mengurangi bahkan menghentikan konsumsi tembakau jika harga tembakau semakin mahal [8] [4] [9] [10] [11] [12]. Manfaat yang didapat dari berhenti merokok adalah keuntungan kesehatan, tabungan tambahan Out-of-Pocket (OOP), dan perlindungan risiko keuangan terhadap penyakit yang berhubungan dengan merokok [6]. Namun kalangan menengah ke bawah di Amerika Serikat (pendapatan dibawah \$ 25,000 per tahun) tidak terlalu berpengaruh pada kenaikan harga tembakau [13]. Diduga karena mereka tidak tersentuh dengan program berhenti merokok dan kondisi tempat kerja tidak menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Jenis pajak cukai tembakau yang diterapkan di berbagai negara berbeda-beda. Secara umum pajak cukai tembakau dibagi menjadi 3 jenis : pertama yaitu tarif berupa jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan batang atau gram hasil tembakau (spesifik), ke-dua yaitu tarif berupa persentase dari harga dasar (*ad valorem*), ke-tiga berupa gabungan (*mixed*) *ad valorem* dengan spesifik. Indonesia menerapkan *ad valorem* dari tahun 1995 hingga 2007, kemudian menerapkan gabungan (*mixed*) *ad valorem* dengan spesifik hingga tahun 2008. Saat ini, pemerintah Indonesia menerapkan sistem spesifik berjenjang dengan menetapkan pajak cukai tembakau dan harga jual eceran tembakau. Negara di dunia mayoritas menggunakan pajak tembakau dengan sistem gabungan (*mixed excised*) yang seragam (*uniform*) misalnya Inggris, 23 negara di Eropa, Meksiko, Turki, Ukraina [14]. Pajak cukai tembakau dengan sistem gabungan (*mixed excised*) yang berjenjang (*tiered*) : China, Indonesia, Taiwan, Thailand [14]. Tarif pajak tembakau yang spesifik yang seragam : Amerika Serikat, Pakistan, Mauritius, Afrika Selatan, Selandia

Baru [14]. Pajak tembakau yang ad valorem atau persentase dari harga dasar misalnya Bangladesh [14].

Telaah Literatur Sistematis

Telaah literatur sistematis atau *Systematic Literature Review* (SLR) adalah penelitian atau metodologi penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan dan mengevaluasi studi yang terkait dengan topik tertentu. Telaah literatur sistematis dilakukan untuk berbagai tujuan, termasuk mengidentifikasi, meninjau, mengevaluasi, dan menafsirkan semua studi yang ada di bidang minat dengan pertanyaan penelitian yang relevan. Telaah literatur sistematis juga sering diperlukan untuk mendefinisikan agenda penelitian, sebagai bagian dari disertasi atau tesis, dan sebagai bagian pelengkap dari proposal hibah penelitian. Telaah pustaka yang sistematis banyak digunakan oleh para peneliti dan akademisi dalam mengkaji literatur ilmiah karena dapat menghindari bias dan subyektif pemahaman penelitian (2). SLR telah terbukti menjadi metode yang dapat memberikan ringkasan tren penelitian dan keefektifannya, serta cakupan penelitian lapangan di penelitian sebelumnya.

METODE

Telaah literatur sistematis “manfaat kenaikan pajak cukai dan harga tembakau” dilakukan pada Januari - Februari 2023 menggunakan pelaporan pilihan item untuk panduan *Systematic Review* dan *Meta-Analyses* atau *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA). Berdasarkan Liberati et al. [15], metode ini terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Menentukan kriteria kelayakan,
2. Mendefinisikan sumber informasi,
3. Pemilihan studi,
4. Proses pendataan,
5. Pemilihan item data,
6. Kriteria Kelayakan.

Kriteria inklusi atau *inclusion criteria* (IC) berikut digunakan sebagai pedoman telaah literatur sistematis:

- IC1: semua literatur asli dan ulasan sejawat ditulis dalam bahasa Inggris tentang manfaat kenaikan pajak cukai dan harga tembakau yang dibuat setelah FCTC ditetapkan oleh WHO tahun 2003.
- IC2: penelitian yang bertujuan untuk memperoleh variabel-variabel manfaat kenaikan pajak cukai dan harga tembakau.

- IC3 : penelitian yang membahas manfaat kenaikan pajak cukai dan harga tembakau selain penurunan prevalensi merokok.

Untuk IC1, hanya penelitian yang ditulis dalam bahasa Inggris yang dipilih karena penelitian dari berbagai dunia umumnya gunakan bahasa Inggris. Sedangkan IC2 hanya fokus pada penelitian manfaat pajak cukai dan harga tembakau. IC3 untuk menyeleksi artikel yang menginformasikan manfaat pajak cukai tembakau selain penurunan prevalensi perokok.

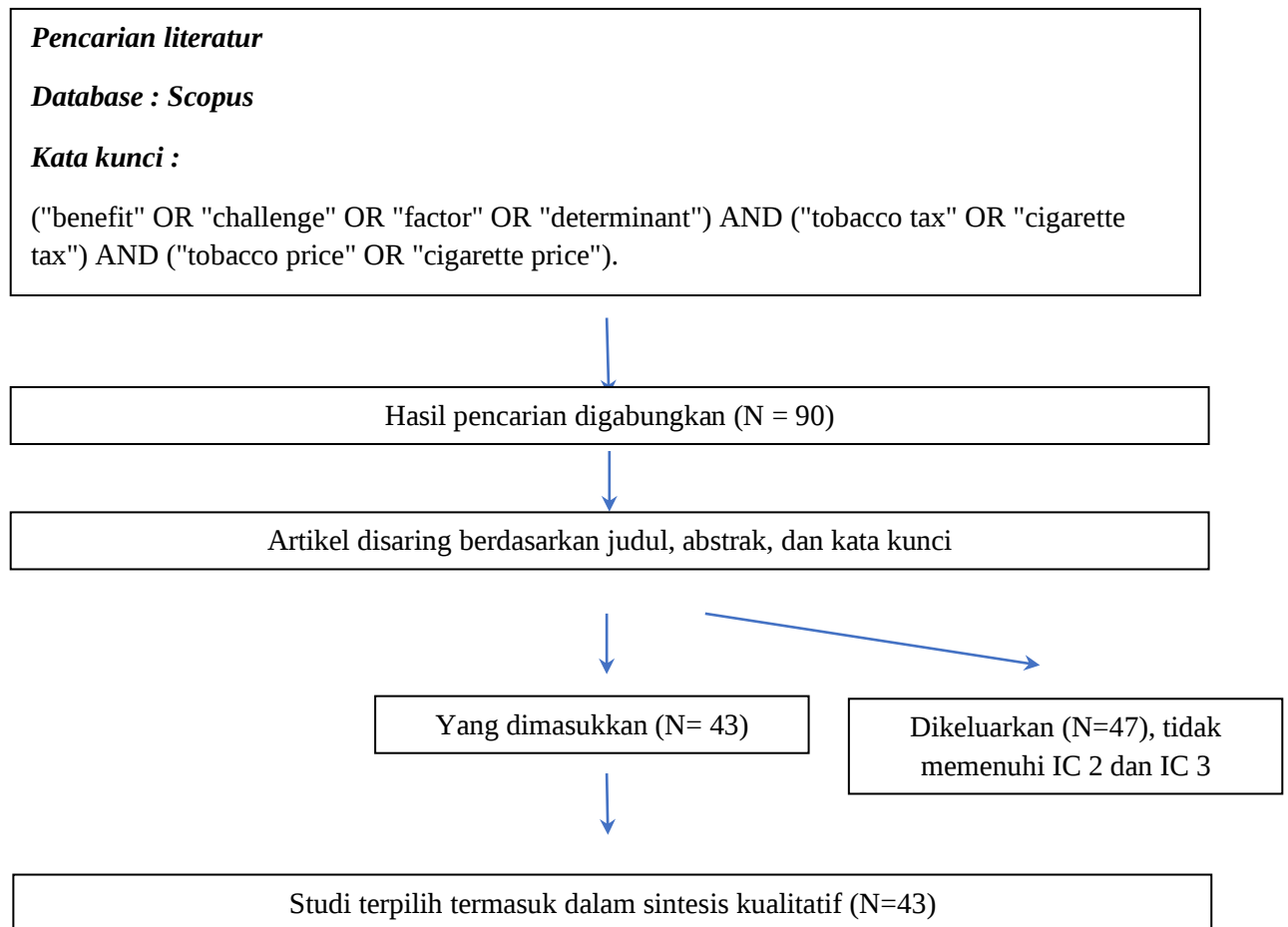
Beberapa penelitian mengaitkan pajak cukai tembakau dengan pengendalian tembakau yang lain yang tercantum dalam MPOWER oleh WHO. Antara lain : memantau penggunaan tembakau dan kebijakan pencegahannya, melindungi orang-orang dari asap tembakau, menawarkan bantuan untuk berhenti merokok, memberi peringatan mengenai bahaya penggunaan tembakau, mendesak larangan iklan, promosi dan sponsor ship tembakau, menaikkan pajak cukai tembakau. Tulisan ini fokus hanya pada manfaat kenaikan pajak cukai dan harga tembakau. Tujuan utama pengendalian tembakau adalah menurunkan konsumsi tembakau yang diukur dengan prevalensi merokok. Namun karena konsumsi tembakau juga berdampak pada sosio-ekonomi masyarakat, maka pajak cukai tembakau yang tinggi juga akan mempengaruhi kondisi sosio-ekonomi masyarakat.

Informasi dilakukan pada *database online* dengan repositori besar studi akademik, yaitu SCOPUS. Artikel yang tidak dapat diakses sepenuhnya juga dikecualikan dalam penelitian ini. Pemilihan studi dilakukan dalam tiga tahap sebagai berikut:

1. Menggunakan kata kunci pencarian sesuai dengan tujuan penelitian yaitu : manfaat, tantangan, faktor, penentu dan pajak cukai tembakau atau pajak rokok dan harga tembakau atau harga rokok ("benefit" OR "challenge" OR "factor" OR "determinant") AND ("tobacco tax" OR "cigarette tax") AND ("tobacco price" OR "cigarette price").
2. Menggali dan memilih judul artikel, abstrak, dan kata kunci berdasarkan kriteria kelayakan.
3. Menggali dan menyeleksi seluruh artikel yang tidak tereliminasi pada seleksi sebelumnya secara lengkap
4. Membaca artikel yang mematuhi kriteria kelayakan.

Data dikumpulkan secara manual dengan ekstraksi data berbasis analisis isi, termasuk jenis artikel, nama jurnal, tahun terbit, topik, judul, metodologi penelitian, responden/data penelitian, negara lokasi penelitian, variabel yang berhubungan dengan manfaat kenaikan pajak dan harga tembakau. Item data yang diambil dari setiap artikel diringkas sebagai berikut: tahun publikasi dan peneliti,

judul, negara dan metode penelitian, hasil penelitian. Tahapan telaah literatur sistematis disajikan komprehensif pada gambar berikut :



Gambar 3 : Diagram Alir PRISMA

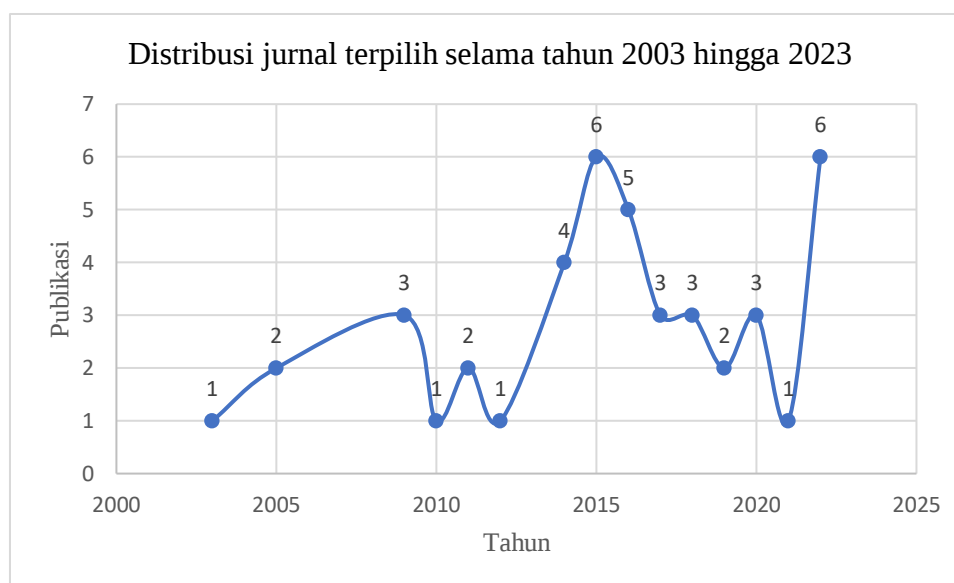
HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil sintesis kualitatif

Hasil pencarian di database SCOPUS melalui kata kunci ("benefit" OR "challenge" OR "factor" OR "determinant") AND ("tobacco tax" OR "cigarette tax") AND ("tobacco price" OR "cigarette price") menghasilkan 90 artikel yang diterbitkan tahun 2003 - 2022 ditulis dalam bahasa Inggris. Artikel-artikel tersebut kemudian dieksplorasi dan dipilih berdasarkan IC2 dan IC3 dengan mempertimbangkan judul, abstrak, dan kata kunci, menghasilkan 87 artikel. Selanjutnya artikel sisanya disaring lagi berdasarkan IC2 dan IC3. Artikel yang berbahasa Meksiko, yang dikategorikan dihilangkan atau tidak diteliti. Akhirnya, setelah proses ini, tersisa 43 artikel dianalisis lebih lanjut.

Jurnal yang membahas manfaat pajak cukai dan tembakau dengan perspektif selain prevalensi, terbit secara berkala sejak ditetapkannya FCTC tahun 2003. Berikut gambarannya :

Tabel 1 : Jumlah publikasi artikel terpilih per tahun semenjak 2003 FCTC



Selanjutnya dilakukan sintesis kualitatif terhadap 43 artikel terpilih, dan dibuat ringkasannya pada Lampiran 1.

Sistematisasi variabel penentu

Dari 43 artikel yang dipilih, determinan manfaat kenaikan pajak dan harga tembakau lebih lanjut dianalisis dengan kriteria tambahan berikut :

1. Penurunan prevalensi merokok dan peningkatan kemungkinan berhenti merokok.
2. Kenaikan pajak tembakau dapat memberikan keuntungan kesehatan dan ekonomi yang signifikan dan merupakan kebijakan yang berpihak pada kaum miskin.

Berdasarkan kriteria di atas, variabel yang dipengaruhi, indikator, hasil, kesimpulan, dan referensi pelaporan keberlanjutan disajikan pada

Tabel 2 : Variabel manfaat kenaikan pajak cukai dan harga tembakau

No	Variabel yang berkaitan	Indikator	Hasil	Kesimpulan	Penelitian Sebelumnya
1		prevalensi dewasa	negatif	hasil yang konsisten	[8][13][16][17]

	Prevalensi konsumsi tembakau	prevalensi remaja	negatif	hasil yang konsisten	[4][18][17][19]
2	Rumah tangga berpendapatan rendah	prevalensi konsumsi tembakau	negatif	hasil yang konsisten	[8] [4][9][10][20] [18][17][21]
			netral	tidak berpengaruh	[13]
		Pengeluaran rumah tangga untuk rokok	negatif	hasil yang konsisten	[8] [4][9][10][20] [21][22]
		Biaya Kesehatan	negatif	hasil yang konsisten	[23][24][25][12][7][11]
		SDGs sehat dan sejahtera	positif	hasil yang konsisten	[9][16]
3	Manfaat Ekonomi	Pendapatan Pajak Negara	positif	hasil yang konsisten	[8][9][5] [11][6] [25][12][7]
		manfaat ekonomi bersih	positif	hasil yang konsisten	[4][26] [11] [25][27]
		kesenjangan sosial ekonomi	negatif	hasil yang konsisten	[22][28][29]
4	Kerugian	Rokok selundupan/ilegal	positif	hasil yang konsisten	[30][31][32]

Variabel penentu

Prevalensi konsumsi tembakau

Penurunan prevalensi merokok adalah tujuan utama ditetapkan pajak tembakau. Terdapat lebih dari 8 artikel menunjukkan hasil yang konsisten antara kenaikan pajak tembakau yang tinggi akan menurunkan prevalensi. Namun dengan beberapa catatan bahwa kenaikan pajak dan harga tembakau mempengaruhi elastisitas permintaan konsumsi tembakau [8] [4] [10] [33] [7] [16] [34] [21] [27] [28] [35] [36]. Dan juga pengendalian tembakau non-fiskal diterapkan misalnya Kawasan Tanpa Rokok [20], penggunaan pajak tembakau untuk program berhenti merokok [36] [37] [38].

Kenaikan pajak cukai dan harga tembakau sangat berpengaruh pada golongan yang memiliki pendapatan rendah yaitu kalangan miskin dan remaja [17] [18]. Remaja responsif terhadap kenaikan harga karena belum menghasilkan pendapatan

dan masih tergantung uang saku. Adanya peningkatan pada harga tembakau akan mendorong remaja untuk mengurangi konsumsi tembakau bahkan berhenti mengkonsumsinya [17] [18] [19].

Rumah tangga berpendapatan rendah

Kebijakan menaikkan pajak cukai tembakau dianggap kebijakan yang mendukung rakyat miskin [12] [7]. Berkurangnya konsumsi rokok di kalangan miskin akan dengan mengurangi pengeluaran tembakau dan biaya pengobatan untuk penyakit terkait tembakau dan meningkatkan masa hidup dan pendapatan bersih di masa depan [8] [4] [9]. Harga rokok yang lebih tinggi akan menguntungkan kuintil (20%) pendapatan termiskin dalam hal kesehatan dan manfaat keuangan [9] [6]. Caranya adalah biaya kesehatan yang ditanggung masyarakat miskin juga berkurang jika mereka mengurangi konsumsi tembakau [23][24][25][12][7][11] . Masyarakat miskin juga dapat meningkatkan tabungan (*out of pocket*) dari uang yang semula untuk membeli tembakau [6] [20].

Peningkatan pajak dan harga tembakau juga bermanfaat untuk pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) [9][16]. Salah satu capaian SDGs adalah tujuan ke-tiga yaitu kehidupan sehat dan sejahtera (*good health and well-being*). Kenaikan pajak yang signifikan menaikkan harga rokok dapat mengurangi pengeluaran tembakau dan biaya pengobatan untuk penyakit terkait tembakau serta meningkatkan masa hidup dan pendapatan di masa depan. Hal ini merupakan tujuan SDGs ke-tiga.

Manfaat Ekonomi

Banyak negara yang melaporkan kenaikan pendapatan pajak dari meningkatnya pajak tembakau [8] [4][9][10][20][21][22]. WHO merekomendasikan kenaikan pajak 70 % untuk bisa mengurangi prevalensi merokok [39]. Beberapa penelitian merekomendasikan kenaikan pajak tembakau perlu mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi agar efektif mengendalikan konsumsi tembakau [19].

Pendapatan ekonomi bersih (*net benefit economy*) atau pendapatan bersih (*net income*) merupakan salah satu manfaat utama dari kenaikan pajak dan harga tembakau [4][26] [11] [25][27]. Seiring dengan menurunnya konsumsi tembakau maka terjadi pengurangan pengeluaran tembakau dan biaya pengobatan untuk penyakit terkait tembakau. Kemudian terjadi peningkatan pada masa hidup dan pendapatan bersih di masa depan. Sehingga manfaat total bagi individu dan masyarakat jauh melampaui pendapatan keuangan publik [4]. Gaya hidup sehat, kesejahteraan yang meningkat merupakan hal yang sulit diukur dengan uang namun memberikan banyak manfaat bagi individu dan masyarakat.

Konsumsi tembakau akan menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi (*inequality*) [22][28][29]. Rumah tangga berpendapatan rendah yang terus membeli tembakau akan mengurangi pengeluaran mereka untuk transportasi, komunikasi, kesehatan, dan pendidikan [22]. Karena itu perlu dibuat pajak cukai tembakau yang secara efektif mengurangi konsumsi tembakau agar dapat mengurangi kesenjangan sosial ekonomi secara tidak langsung. Menaikkan harga rokok melalui peningkatan pajak cukai tembakau dapat menghasilkan situasi *win-win solution* dengan cara : mengurangi konsumsi rokok, meningkatkan pendapatan pajak cukai tembakau, dan berpotensi menurunkan kesenjangan sosial ekonomi [28].

Kerugian

Dampak kerugian dari kenaikan pajak cukai dan harga tembakau adalah munculnya rokok ilegal [30][31][32]. Meskipun kebijakan pajak sangat efektif dalam mengurangi konsumsi, perdagangan gelap dapat mengurangi (meski tidak menghilangkan) efektivitasnya [31]. Pajak cukai tembakau dapat dialokasikan untuk peningkatan dana bagi hasil pajak cukai tembakau untuk regional agar dapat mengurangi penyelundupan tembakau dan untuk memaksimalkan efektivitas dalam mengekang epidemi tembakau [32].

DISKUSI

Fokus utama dari penelitian adalah mencari manfaat dari kenaikan pajak cukai dan harga tembakau. Selain turunnya prevalensi merokok ternyata ditemukan manfaat lain secara langsung ataupun tidak langsung. Lebih dari 8 artikel yang menunjukkan hasil konsisten antara kenaikan pajak cukai tembakau dengan penurunan prevalensi merokok. Dibuktikan secara global bahwa dari tahun 1990 hingga 2019, perokok pria turun sebanyak -27,5 % menjadi 32,7 % dan prevalensi perokok wanita 6,62% [1].

Secara ringkas studi literatur secara sistematis dari manfaat kenaikan pajak dan harga tembakau berdasarkan tabel 2 adalah sebagai berikut :

1. Kenaikan pajak cukai tembakau yang tinggi akan menurunkan prevalensi. Namun dengan catatan bahwa kenaikan pajak cukai dan harga tembakau mempengaruhi elastisitas permintaan konsumsi tembakau.
2. Kenaikan pajak cukai dan harga tembakau sangat berpengaruh pada golongan yang memiliki pendapatan rendah yaitu kalangan miskin dan remaja.
3. Harga tembakau yang lebih tinggi akan menguntungkan kuintil (20%) pendapatan terendah dalam hal kesehatan dan manfaat keuangan.
4. Peningkatan pajak cukai dan harga tembakau juga bermanfaat untuk pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu tujuan ke-tiga yaitu kehidupan sehat dan sejahtera.

5. Banyak negara yang melaporkan kenaikan pendapatan pajak dari meningkatnya pajak cukai tembakau.
6. Menaikkan harga tembakau melalui peningkatan pajak dapat menghasilkan situasi *win-win solution* dengan cara : mengurangi konsumsi tembakau, meningkatkan pendapatan pajak cukai tembakau, dan berpotensi menurunkan kesenjangan sosial ekonomi.
7. Pajak cukai tembakau tingkat pusat dapat dialokasikan untuk pemerintah daerah agar dapat melakukan penegakan hukum terhadap penyelundupan tembakau.

KESIMPULAN

Berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang dirancang, 43 studi dipilih dan diidentifikasi. Analisis studi utama mengungkapkan bahwa penelitian manfaat dari kenaikan pajak cukai dan harga tembakau berfokus pada 4 topik dan tren: prevalensi merokok dewasa, remaja, dan masyarakat berpendapatan rendah ; Rumah tangga berpendapatan rendah dilihat dari pengeluaran rumah tangga untuk rokok, biaya Kesehatan, SDGs sehat dan sejahtera; manfaat ekonomi berupa pendapatan pajak negara, manfaat ekonomi bersih, kesenjangan sosial ekonomi; kerugian yang diakibatkan oleh rokok selundupan/ilegal. Hasil dari kajian ini menambah fokus tujuan pengendalian tembakau yaitu dukungan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah. Dari penelitian ini ditemukan bahwa negara yang menerapkan FCTC dan menaikkan pajak tembakau memiliki penurunan prevalensi merokok yang signifikan dibandingkan Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk mengoptimalkan manfaat kenaikan pajak tembakau dengan mengadopsi pengendalian tembakau di negara yang berhasil menurunkan prevalensi merokok.

Keterbatasan dari telaah sistematis ini berkaitan dengan fokus pada aspek kualitatif manfaat kenaikan pajak cukai dan harga tembakau. Belum sampai menyentuh aspek kuantitatifnya. Misalnya menghitung elastisitas harga dan elastisitas keterjangkauan (*affordability*) untuk digunakan dalam menganalisis pengaruh kenaikan cukai hasil tembakau terhadap konsumsi tembakau, kesehatan masyarakat, aspek sosial ekonomi secara global.

DAFTAR PUSTAKA

- Alcaraz, A., Caporale, J., Bardach, A., Augustovski, F., and Pichon-Riviere, A. (2016) '[Burden of disease attributable to tobacco use in Argentina and potential impact of price increases through taxes]', *Rev. Panam. Salud Publica* , 40(4), pp. 204-212. [Online] Available at: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28001195>.

- Bardach, A. E., et al. (2016) 'Burden of smoking-related disease and potential impact of cigarette price increase in Peru', *Rev. Peru. Med. Exp. Salud Publica* , 33(4), pp. 651-661, doi: 10.17843/rpmesp.2016.334.2548.
- Bardach, A., et al. (2022) 'The estimated benefits of increasing cigarette prices through taxation on the burden of disease and economic burden of smoking in Nigeria: A modeling study', *PLoS One* , 17(3 March), doi: 10.1371/journal.pone.0264757.
- Baum, C. L. (2009) 'The effects of cigarette costs on BMI and obesity.' *Health Econ.* , 18(1), pp. 3-19. doi: [10.1002/hec.1340](<https://doi.org/10.1002/hec.1340>).
- Chen, Y., & Xing, W. (2016) 'Quantity, quality, and regional price variation of cigarettes: Demand analysis based on a household survey in China.' In *Economics of Tobacco Control in China: From Policy Research to Practice* , 4, pp. 61-86. doi: [10.1142/9789813108721_0005](https://doi.org/10.1142/9789813108721_0005).
- Choi, K., & Boyle, R. G. (2013) 'Minnesota smokers' perceived helpfulness of 2009 federal tobacco tax increase in assisting smoking cessation: A prospective cohort study.' *BMC Public Health* , 13(1). doi: [10.1186/1471-2458-13-965](<https://doi.org/10.1186/1471-2458-13-965>).
- Choi, S. E. (2016) 'Are lower income smokers more price sensitive?: The evidence from Korean cigarette tax increases', *Tobacco Control* , 25(2), pp. 141-146, doi: 10.1136/tobaccocontrol-2014-051680.
- Divino, J. A., Ehrl, P., Candido, O., & Valadao, M. A. P. (2022) 'Extended cost-benefit analysis of tobacco taxation in Brazil.' *Tobacco control* , 31, s74-s79. doi: [10.1136/tobaccocontrol-2021-056806](<https://doi.org/10.1136/tobaccocontrol-2021-056806>).
- Fuchs Tarlovsky, A., & González Icaza, M. F. (2021) 'Tobacco taxes for improving welfare and distributional outcomes: the case of Georgia.' *Eur. J. Public Health* , 31(5), pp. 936-942. doi: [10.1093/eurpub/ckab029](<https://doi.org/10.1093/eurpub/ckab029>).
- Garcés, A., et al. (2014) 'Conference report on tobacco taxes in central America: Current situation and opportunities to reduce prevalence and increase fiscal revenues.' *Nicotine Tob. Res.* , 16(SUPPLEMENT1). doi: [10.1093/ntr/ntt048](<https://doi.org/10.1093/ntr/ntt048>).
- Gligorić, D., Preradović Kulovac, D., Mičić, L., & Pepić, A. (2022) 'Price and income elasticity of cigarette demand in Bosnia and Herzegovina by different socioeconomic groups.' *Tob Control* , 31, s101-s109. doi: [10.1136/tobaccocontrol-2021-056881](<https://doi.org/10.1136/tobaccocontrol-2021-056881>).

- Goodchild, M., & Zheng, R. (2018) 'Early assessment of China's 2015 tobacco tax increase.' *Bull World Health Organ* , 96(7), pp. 506-512. doi: [10.2471/BLT.17.205989](<https://doi.org/10.2471/BLT.17.205989>).
- Huang, J., Zheng, R., Chaloupka, F. J., Fong, G. T., & Jiang, Y. (2015) 'Differential responsiveness to cigarette price by education and income among adult urban Chinese smokers: Findings from the ITC China Survey.' *Tob. Control* , 24, pp. iii76-iii82. doi: [10.1136/tobaccocontrol-2014-052091](<https://doi.org/10.1136/tobaccocontrol-2014-052091>).
- Jha, P., Wu, D. C., Dutta, S., & Marquez, P. (2020) 'Impact of cigarette price increase on health and financing outcomes in Vietnam.' *Gates Open Res* , 3. doi: [10.12688/gatesopenres.13051.2](<https://doi.org/10.12688/gatesopenres.13051.2>).
- Jha, P., Wu, D. C., Sheel, V., Gupta, P., Essue, B. M., & Luong, L. (2020) 'Impact of cigarette tax increase on health and financing outcomes in four Indian states.' *Gates Open Res.* , 4. doi: [10.12688/gatesopenres.13127.1](<https://doi.org/10.12688/gatesopenres.13127.1>).
- Kostova, D., et al. (2014) 'Cigarette prices and smoking prevalence after a tobacco tax increase--Turkey, 2008 and 2012.' *MMWR Morb Mortal Wkly Rep* , 63(21). Available at: [PubMed](<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24871250>).
- Lancet (London, England). (2021) 'Spatial, temporal, and demographic patterns in prevalence of smoking tobacco use and attributable disease burden in 204 countries and territories, 1990-2019: a systematic analysis from the Global Burden of Disease Study 2019.' *Lancet* , 397(10292), pp. 2337-2360. doi: [10.1016/S0140-6736(21)01169-7]([https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(21\)01169-7](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)01169-7)).
- Le, T. T. T., & Jaffri, M. A. (2022) 'The association between smoking behaviors and prices and taxes per cigarette pack in the United States from 2000 through 2019.' *BMC Public Health* , 22(1). doi: [10.1186/s12889-022-13242-5](<https://doi.org/10.1186/s12889-022-13242-5>).
- Liberati, A., et al. (2009) 'The PRISMA statement for reporting systematic reviews and meta-analyses of studies that evaluate health care interventions: explanation and elaboration.' *J Clin Epidemiol* , 62(10).
- Nargis, N., et al. (2014) 'The price sensitivity of cigarette consumption in Bangladesh: Evidence from the international tobacco control (ITC) Bangladesh wave 1 (2009) and wave 2 (2010) surveys', *Tob. Control* , 23(SUPPL. 1), doi: 10.1136/tobaccocontrol-2012-050835.
- Nargis, N., Stoklosa, M., Shang, C., & Drope, J. (2021) 'Price, Income, and Affordability as the Determinants of Tobacco Consumption: A Practitioner's

- Guide to Tobacco Taxation.' *Nicotine Tob Res* , 23(1), pp. 40-47. doi: [10.1093/ntr/ntaa134](<https://doi.org/10.1093/ntr/ntaa134>).
- Nguyen, A., & Nguyen, H. T. (2022) 'Income and cigarette price responsiveness: Evidence from Vietnam.' *Tob. Control* . doi: [10.1136/tc-2022-057584](<https://doi.org/10.1136/tc-2022-057584>).
- Oshio, T., & Nakamura, R. (2022) 'Trends and Determinants of Cigarette Tax Increases in Japan: The Role of Revenue Targeting.' *Int J Environ Res Public Health* , 19(8). doi: [10.3390/ijerph19084892](<https://doi.org/10.3390/ijerph19084892>).
- Paraje, G., Stoklosa, M., and Blecher, E. (2022) 'Illicit trade in tobacco products: recent trends and coming challenges', *Tob. Control* , 31(2), pp. 257-262, doi: 10.1136/tobaccocontrol-2021-056557. Berikut adalah referensi dalam gaya kutipan Harvard:
- Peng, L., & Ross, H. (2009) 'The impact of cigarette taxes and advertising on the demand for cigarettes in Ukraine.' *Cent. Eur. J. Public Health* , 17(2), pp. 93-98. doi: [10.21101/cejph.a3518](<https://doi.org/10.21101/cejph.a3518>).
- Pichon-Riviere, A., et al. (2020) 'The health and economic burden of smoking in 12 Latin American countries and the potential effect of increasing tobacco taxes: an economic modelling study', *The Lancet Global Health* , 8(10), pp. e1282-e1294, doi: 10.1016/S2214-109X(20)30311-9.
- Raei, B., Emamgholipour, S., Takian, A., Yaseri, M., Abdoli, G., & Alizadeh, A. (2021) 'Distributional health and financial consequences of increased cigarette tax in Iran: extended cost-effectiveness analysis.' *Health Econ Rev* , 11(1). doi: [10.1186/s13561-021-00328-w](<https://doi.org/10.1186/s13561-021-00328-w>).
- Ross, H., Driezen, P., Sirirassamee, B., & Kin, F. (2009) 'Cigarette purchasing behaviour in Thailand and Malaysia: Comparative analysis of a semi-monopolistic and a free-market structure.' *Glob. Public Health* , 4(6), pp. 588-599. doi: [10.1080/17441690903072204](<https://doi.org/10.1080/17441690903072204>).
- Ross, H., Moussa, L., Harris, T., and Ajodhea, R. (2018) 'The heterogeneous impact of a successful tobacco control campaign: A case study of Mauritius', *Tobacco Control* , 27(1), pp. 83-89, doi: 10.1136/tobaccocontrol-2016-053412.
- Saenz-de-Miera, B., Wu, D. C., Essue, B. M., Maldonado, N., Jha, P., & Reynales-Shigematsu, L. M. (2022) 'The distributional effects of tobacco tax increases across regions in Mexico: an extended cost-effectiveness analysis.' *International Journal for Equity in Health* , 21(1). doi: [10.1186/s12939-021-01603-2](<https://doi.org/10.1186/s12939-021-01603-2>).

- Sheikh, Z. D., Branston, J. R., & Gilmore, A. B. (2021) 'Tobacco industry pricing strategies in response to excise tax policies: A systematic review.' *Tob. Control* . doi: [10.1136/tobaccocontrol-2021-056630](<https://doi.org/10.1136/tobaccocontrol-2021-056630>).
- Stoklosa, M., Drope, J., & Chaloupka, F. J. (2016) 'Prices and e-cigarette demand: Evidence from the European Union.' *Nicotine Tob. Res.* , 18(10), pp. 1973-1980. doi: [10.1093/ntr/ntw109](<https://doi.org/10.1093/ntr/ntw109>).
- Tarlovsky, A. F. (2021) 'Tobacco taxes for improving welfare and distributional outcomes: The case of Georgia.' *Eur. J. Public Health* , 31(5), pp. 936-942. doi: [10.1093/eurpub/ckab029](<https://doi.org/10.1093/eurpub/ckab029>).
- Thomson, G., O'Dea, D., Wilson, N., and Edwards, R. (2010) 'Government paralysis? Stable tobacco prices mean preventable deaths and disease persist, along with health inequalities in New Zealand', *New Zealand Medical Journal* , 123(1308). [Online] Available at: <https://www.nzma.org.nz/journal-articles/government-paralysis-stable-tobacco-prices-mean-preventable-deaths-and-disease-persist-along-with-health-inequalities-in-new-zealand>.
- Tsai, Y. W., Sung, H. Y., Yang, C. L., & Shih, S. F. (2003) 'The behaviour of purchasing smuggled cigarettes in Taiwan.' *Tobacco Control* , 12(1), pp. 28-33. doi: [10.1136/tc.12.1.28](<https://doi.org/10.1136/tc.12.1.28>).
- Verguet, S., et al. (2016) 'The consequences of tobacco tax on household health and finances in rich and poor smokers in China: An extended cost-effectiveness analysis', *Economics of Tobacco Control in China: From Policy Research to Practice* , 4, pp. 215-243, doi: 10.1142/9789813108721_0013.
- Verguet, S., et al. (2017) 'Distributional benefits of tobacco tax and smoke-free workplaces in China: A modeling study', *Journal of Global Health* , 7(2), doi: 10.7189/jogh.07.020701.
- World Health Organization. (2015) 'The economic and health benefits of tobacco taxation.' [online] apps.who.int, p. 8. Available at: [http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/179423/WHO_NMH_PND_15.6_eng.pdf?sequence=1%0Ahttp://www.who.int/tobacco/global_report/2013/who_fctc.pdf?ua=1](http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/179423/WHO_NMH_PND_15.6_eng.pdf?sequence=1%0Ahttp://www.who.int/tobacco/global_report/2013/who_fctc.pdf?ua=1).
- World Health Organization. Framework Convention on Tobacco Control. (2015) 'The economic and health benefits of tobacco taxation.' Available from: [http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/179423/WHO_NMH_PND_15.6_eng.pdf?sequence=1%0Ahttp://www.who.int/tobacco/global_report/2013/who_fctc.pdf?ua=1](http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/179423/WHO_NMH_PND_15.6_eng.pdf?sequence=1%0Ahttp://www.who.int/tobacco/global_report/2013/who_fctc.pdf?ua=1).

- Kementerian Kesehatan. (2019) Riskedas 2018. s.l.: Banglitbang Kemenkes.
- Kementerian Keuangan. (2021) [Online] Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021. [Accessed 2021].
- Kementerian Keuangan. (2023) [Online] [Cukai Rokok Naik 10% pada 2023 dan 2024, Ini Data Historisnya.](<https://dataindonesia.id/bursa-keuangan/detail/cukai-rokok-naik-10-pada-2023-dan-2024-ini-data-historisnya>) [Accessed 2023].
- Kitchenham, B. and Charters, S. (2007) Guidelines for Performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering. s.l.: Keele University.
- WHO; Ministry of Health Indonesia. (2021) The Global Adult Tobacco Survey (GATS) 2021 Indonesia. s.l.: WHO.